

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Di dalam setiap aspek kehidupan, permasalahan dalam bentuk apapun pasti terjadi, begitu pula dalam lingkup dunia pekerjaan di suatu perusahaan/instansi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan). Menurut Istijanto, masalah adalah salah satu bagian yang paling utama dan terpenting dalam proses riset, karena masalah dapat memberikan pedoman jenis informasi yang nantinya akan dicari penyelesaiannya.

Dalam penelitian yang penulis jalani di BPJS Kesehatan terdapat masalah yang terjadi dalam hal penerimaan iuran PBPU yang masih cukup jauh dari target yang ingin dicapai pada periode bulan Januari - Agustus 2019. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas soal permasalahan penagihan iuran. Terdapat keluhan dari bagian penagihan dikarenakan para peserta PBPU yang sulit untuk ditagih sehingga target perusahaan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Rancangan Program 1

Penulis ingin mencoba mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan menerapkan sistem “Door to Door” dalam hal ini pihak BPJS Kesehatan memerlukan kader-kader JKN sebagai pihak penagih Door to Door untuk

dapat memaksimalkan penagihan iuran yang akan ditagih. Dalam hal kunjungan personal pihak BPJS Kesehatan pun akan lebih banyak mengetahui keberadaan dan realita kehidupan pihak tertagih (dalam hal ini jujur/tidaknya dengan alasan yang diberikan) selama penagihan-penagihan sebelumnya baik itu lewat sms, telpon, ataupun surat teguran. Sehingga transparansi data peserta BPJS Kesehatan dapat terus dipantau dan dikontrol secara berkala jikalau mungkin ada perubahan data, seperti berpindah domisili/tempat tinggal maka informasi yang didapat pula akan lebih mudah didapatkan lewat pemantauan/pengamatan/pengawasan secara langsung (direct monitoring).

Direct Monitoring sendiri juga berguna untuk melakukan pembaharuan data (update data) dari berbagai aspek/lini data kepesertaan yang selama ini tidak diketahui kebaruan datanya sehingga menjadi solusi pula bagi pengontrolan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan guna kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan.

Di samping itu juga hal ini dapat menjadi ajang bagi para kader JKN untuk mensosialisasikan dan mengenalkan produk serta manfaat dari BPJS Kesehatan seiring dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang harus ditingkatkan, maka kepatuhan pun akan meningkat. Maka, secara tidak langsung terbangun “trust” dari para peserta yang menunggak dengan alasan-alasan tertentu sehingga dapat membuat orang dengan sendirinya membutuhkan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan hidupnya

Dalam kesempatan di program pertama ini sendiri penulis juga menghasilkan 3 program sekaligus yang masih berkesinambungan satu dengan yang lainnya bagi pihak BPJS Kesehatan yakni “Door to Door” , “Direct Monitoring”, dan “Sosialisasi/Edukasi Produk BPJS Kesehatan dan Manfaatnya bagi Peserta”

4.2.2 Pembahasan Rancangan Program 2

Selain itu juga, program kedua yang penulis ajukan adalah menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah terkait seperti samsat, pihak kepolisian, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dsb. Hal ini penulis ajukan dengan tujuan guna keterbukaan informasi antara pihak BPJS Kesehatan dengan pihak instansi lainnya yang diharapkan dapat menjadi akses yang lebih luas bagi pihak BPJS Kesehatan untuk dapat memaksimalkan penagihan iuran PBPU. Misalnya, akses terbatas bagi peserta BPJS Kesehatan yang ingin mendapatkan administrasi lainnya, seperti SIM, STNK, KTP, KK, pembayaran pajak kendaraan, dsb sehingga dengan begitu para peserta BPJS Kesehatan diharapkan akan membayarkan tagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatannya terlebih dahulu jika ingin mengurus administrasi di kantor-kantor pemerintah terkait lainnya (pembayaran sekaligus), maka jika ingin membayar tunggakan lainnya atau ingin mengurus kepentingan administrasi sebagai penduduk perlu adanya pengecekan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi kategori PBPU sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat penerimaan iuran yang diharapkan selaras dengan tingkat capaian kolektibilitas iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.

Hasil dari program-program yang telah dirancang oleh penulis diharapkan dapat membantu pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung untuk dapat memperluas sinergi BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Penerapan program ini bisa lebih dikembangkan dan diperbarui lagi untuk menjadikan sebuah peningkatan dalam ketercapain kolektibilitas iuran PBPJ pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung agar dapat mencapai target yang diinginkan.